



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juni 2016

Halaman: 2

DORONG TRANSPARANSI TAHAPAN PILWALI

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilihan

YOGYA (KR) - Terhitung sejak 1 Juni 2016, KPU Kota Yogya mempersilakan elemen masyarakat yang hendak melakukan proses pemantauan pemilihan. Pendaftaran bagi pemantau tersebut akan dilayani hingga 14 Februari 2017 mendatang atau sehari jelang pemungutan suara.

Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budianto, Minggu (5/6), menuturkan pemantau pemilihan merupakan hak setiap warga. Pihaknya pun tidak melakukan perekrutan lantaran pemantau tersebut bukan bagian dari tim adhoc penyelenggara pemilu. "Kami berikan kesempatan bagi kelompok masyarakat atau lembaga apapun yang ingin melakukan pemantauan. Tapi harus mendaftar ke KPU dan sudah

kami layani," paparnya.

Syarat utama pemantau tersebut ialah independen atau tidak memiliki afiliasi ke parpol tertentu, memiliki kelembagaan serta sumber dana yang jelas, terdaftar dan terakreditasi oleh KPU. Pemantau tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga dalam negeri, pihak swasta maupun asing juga diperkenankan. Namun khusus untuk pemantau asing, harus mendaftar ke KPU RI.

Wawan menyebut, pendaftaran pemantau sengaja dibuka sejak awal guna mendorong transparansi tahapan Pilwali Yogya 2017. Kendati sebagian besar pemantau hanya ingin mengawasi saat proses pemungutan suara hingga perhitungan, namun setiap tahapan yang dilakukan KPU juga boleh dipantau.

"Kami berikan kesempatan yang luas bagi masyarakat. Ketugasan kami yang paling dekat ialah membentuk tim adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu pemutakhiran data pemilih. Itu semua silakan jika hendak dipantau, asalkan pemantau sudah lolos akreditasi dari kami," pa-

parnya.

Setiap kali penyelenggaraan pemilu, jumlah lembaga yang menjadi pemantau relatif sangat sedikit. Tidak bisa dipungkiri, untuk melakukan pemantauan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Terutama untuk memberikan honor para relawan yang kelak akan disebar di tiap daerah maupun tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Padahal, setiap pemantau yang sudah terakreditasi akan diberikan hak atau akses dalam pengumpulan data. Meski demikian, tetap ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar supaya proses pemantauan tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005